

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari analisis temuan aset tetap pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga sebagai berikut :

1. Peralatan dan mesin merupakan aset tetap yang paling sering menjadi temuan pada Kementerian/Lembaga, baik berdasarkan jumlah kasus maupun dari nilai temuan tahun 2012 - 2014.
2. Untuk tahun 2012 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) menempati posisi pertama yang paling banyak kasus temuan aset tetapnya. Sedangkan dari segi nilai temuan aset tetap, Kementerian Komunikasi dan Informatika menempati peringkat pertama.
3. Tahun 2013 Kementerian Komunikasi dan Informatika menempati peringkat pertama berdasarkan jumlah kasus temuan aset tetap. Sedangkan dari segi nilai temuan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menempati posisi pertama.
4. Untuk tahun 2014 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menempati peringkat pertama baik dari segi jumlah kasus maupun dari segi nilai temuan aset tetap.
5. Permasalahan utama yang menyebabkan aset tetap menjadi temuan pada Kementerian/Lembaga pada tahun 2012 – 2014, baik dari segi jumlah maupun nilai temuan aset tetap adalah pencatatan dan penatausahaan aset

tetap tidak sesuai peraturan yang berlaku dan permasalahan pengadaan aset tetap

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kementerian/Lembaga hendaknya segera menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap temuan aset tetap yang terjadi, agar tidak menjadi temuan berulang di tahun berikutnya
2. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada petugas SIMAK BMN dan pihak yang terlibat dalam penatausahaan dan pengadaan aset tetap agar dapat melakukan tugasnya dengan baik, disiplin, sesuai ketentuan, dan peraturan yang berlaku
3. Kementerian/Lembaga hendaknya menjalin koordinasi yang baik dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah lainnya seperti: Kementerian Keuangan sebagai pengelola barang, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam rangka mempercepat penerbitan sertifikat aset tetap Kementerian/Lembaga.

5.3 Keterbatasan

Penelitian ini hanya berfokus pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, sehingga kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan analisis terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan dan opini audit yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.